

## BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

### DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2025 bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm  
 NIP : 19730630 200003 1 001  
 Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  
2. Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid  
 NIP : 19660909 199303 2 002  
 Jabatan : Ketua Tim Evaluasi Internal di Lingkup Kedepuitan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

#### 1) Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	sd Oktober						sd November						sd Desember					
		Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	13250	13250	100	4144275000	4142400729	99,95%	13250	13250	100	4144275000	4143260729	99,98%	13250	13250	100	4144275000	4144270729	100,00%
2	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	8900	7.935	84.00	4133965000	3248449686	78,58%		8.435	92.00	4133965000	3664050607	88,63%	8900	9.785	100.00	4133965000	4133946611	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Output	sd Oktober						sd November						sd Desember					
		Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
3	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	3000	2,497	82.40	6293912000	4753341417	75,52%	3,708	2,797	91.40	6293912000	5246604897	83,36%	3000	3,708	100.00	6293912000	6293883848	100,00%
4	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	15971			4692842000	3838544803	81,80%	15971			4692842000	4432731807	94,46%	15971	24,125	100.00	4692842000	4692819309	100,00%
	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	1675			4489961000	3954675905	88,08%	1675			4489961000	4323085936	96,28%	1675	1,911	100.00	4489961000	4489934795	100,00%
	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	73.154	108.155		9971199000	8496670167	85,21%	73.154	121.084		9971199000	9902737489	99,31%	73.154	132,024	100.00	9971199000	9971129693	100,00%
	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan				678131000	353582808	52,14%				678131000	557555808	82,22%		180	100.00	678131000	678130808	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Output	sd Oktober						sd November						sd Desember					
		Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran (dalam ribuan)			Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun				3966271000	3638519545	91,74%				3966271000	3817643617	96,25%		10	100,00	3966271000	3966266457	100,00%
	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				668713000	623796240	93,28%				668713000	668711240	100,00%		62	100,00	668713000	668711240	100,00%
	Perangkat pengolah data dan komunikasi				1183348000	1149848000	97,17%				1183348000	1183348000	100,00%		1	100,00	1183348000	1183348000	100,00%
	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OT, SK dan Kos				3560829000	3229799179	90,70%				3560829000	3435301567	96,47%	294	311	100,00	3560829000	3560813659	100,00%
	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar				6398209000	5430855235	84,88%				6398209000	6001118803	93,79%	169	169	100,00	6398209000	6398185741	100,00%

2) Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per bulan Triwulan IV

Sasaran/Indikator	sd Bulan Desember			Realisasi Anggaran sd Bulan Desember		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Perspektif 1 Stakeholder</b>						
<b>SS1 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</b>						
Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	89	89.20	100.23	2.445.333.000	538.487.929	100
Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	97	93.01	95.88	2.214.336.000	482.141.092	100
<b>SS 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>						
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	88	87.83	99.81	1.228.135.000	199.800.000	100
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	84	86.71	103.23	2.535.966.000	466.504.650	100
<b>SS3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos</b>						
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	94.8	95.28	100.50	766.955.000	77.953.604	100
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	80	83.18	103.97	1.497.159.000	298.542.515	100
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	90.45	91.03	100.65	1.435.462.000	315.140.000	100
<b>Perspektif 2 Bisnis Proses</b>						
<b>SS4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos</b>						
Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	85.37	85.38	100.01	3.810.658.000	737.199.700	100
<b>SS5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos</b>						

Sasaran/Indikator	sd Bulan Desember			Realisasi Anggaran sd Bulan Desember		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	90.68	98.03	4.543.105.000	368.164.735	100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,5	83.94	101.75	1.904.269.000	623.294.233	100
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92	94.12	102.30	1.965.925.000	204.902.370	100
Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	99.2	99.27	100.07	726.546.000	356.838.640	100
Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4.71	4.89	103.91	3.269.616.000	390.001.695	100
Persentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	93.5	95.32	101.95	4.163.494.000	691.792.520	100
<b>SS6 Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>						
Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90.07	100.08	424.303.000	62.135.000	100
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100	100.00	100.00	2.234.340.000	154.734.264	100
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100	100.00	100.00	2.014.923.000	587.312.115	100
<b>Perspektif 3 Learn and Growth</b>						
<b>SS 7 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal</b>						
Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	92.04	89.54	97.29	4.287.572.000	1.102.746.088	100
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	80.05	80.66	100.76	250.040.000	41.835.600	100
Nilai Pengelolaan kirpan	96.02	98.19	102.26	250.000.000		100





Indikator		Target Tahunan	Realisasi Bulan 10			Realisasi Bulan 11			Realisasi Bulan 12		
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	85.37									85.38
IKSP 9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5	9158	10072	90.93	10180	11199	90.90	11266	12424	90.68
	Dit, Was OTSK		3700	4058	91.18	4117	4525	90.98	4573	5042	90.70
	Dit, Was Kos		5458	6014	90.75	6063	6674	90.85	6693	7382	90.67
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5	933	1123	83.08	1123	1333	84.25			83.94
	Dit, Was OTSK		522	643	81.18	613	749	81.84	669	815	82,09
	Dit, Was Kos		411	480	85.63	510	584	87.33	643	748	87,33
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92	7	10	70.00%	7	10	70.00	16	17	94.12
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	99.2			99.22			99.21			99.27
	Dit,PMPU				99.22			99.21			99.27
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4.71			4.89			4.89			4.89
	Dit, Was OTSK				4.93			4.93			4.93
	Dit, Was Kos				4.78			4.78			4.78







- 4) Tindak lanjut/perbaikan terhadap kendala/hambatan pada periode sebelumnya, untuk perbaikan kinerja periode berikutnya

### Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos					
2	Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	<p>1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat</p> <p>2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan.</p> <p>3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK</p>		<p>1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman penandaan temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan melalui grup Whatsapp evaluator penandaan OTSK per bulan Juni 2024 serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BPOM di Aceh (BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan) pada tanggal 3 Juni 2024</p> <p>2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka</p>	<p>1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman penandaan temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2</p> <p>2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan</p>	Selesai

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	Selesai	tindak lanjut Rencana Aksi	Timeline
				Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024 2. 1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2 2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan		
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun tidak ada kendala		Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 2024 yang dilaksanakan 23 Januari 2024		Selesai

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala				
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala		Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024 dilaksanakan 23 Februari 2024		Selesai
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala				selsai
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1. Selain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan responden pengguna layanan, terdapat beberapa survei lain dengan menyoasar pengguna layanan sebagai responden. Selain itu banyak pengguna layanan Ditwas OTSK juga merupakan pengguna layanan unit pelayanan publik yang lain sehingga pengguna layanan berkali-kali diminta mengisi survei. Hal ini berpotensi menimbulkan bias (kesalahan pemilihan layanan publik dan kekeliruan dalam menilai unit pelayanan) karena pengguna layanan berkali-kali mengisi kuesioner untuk berbagai survei dan unit pelayanan publik. 2. Dikarenakan permasalahan kejadian tidak diinginkan berupa gangguan akses tautan kuesioner SKM, pelaksanaan SKM diperpanjang hingga 12 Juli 2024, sesuai surat Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi nomor B-OT.03.04.22.07.24.137 tanggal 5 Juli 2024.				Selesai
8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun				
9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat 2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. 3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK		1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.0 5.24.385		Selesai

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	Selesai	tindak lanjut	Timeline
				<p>tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan melalui grup Whatsapp evaluator penandaan OTSK per bulan Juni 2024 serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BPOM di Aceh (BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan) pada tanggal 3 Juni 2024</p> <p>2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024</p> <p>1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2</p> <p>2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat</p>		

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
				penyelesaian tindak lanjut temuan		
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	PPMSE (platform dan penjual) belum sepenuhnya memahami ketentuan berkaitan dengan kewajiban pengisian NIE OT dan SK sesuai Permendag 31 tahun 2023		<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tanggal 14 Mei 2024</li> <li>Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI) tanggal 23 Mei 2024</li> <li>Forum Diskusi MEkanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan tanggal 28 Mei 2024</li> </ol>		Selesai
11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	Tidak ada kendala, realisasi melebihi target		<p>Terdapat 3 lintas sektor yang bersinergi dalam pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kwarda Pramuka</li> <li>YPI</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi</li> </ol>		selesai
12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	Penilaian oleh HUKOR		Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan juni didapatkan indeks sebesar 98,71		selesai
13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 1 tahun terdapat beberapa kali penilaian terhadap unit pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi/K/L yang berbeda-beda menggunakan tools yang berbeda-beda dan bahkan juga menggunakan survei kepada pengguna layanan sehingga pelaksanaan menjadi tidak efisien dan dapat menimbulkan bias terhadap hasil penilaian</li> <li>Terdapat kegiatan dan isu dengan tingkat urgensi yang lebih tinggi untuk segera dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pelatihan petugas yanblik belum dapat dilaksanakan</li> </ol>		Persiapan pelaksanaan penilaian PEKPPP melalui pengisian lembar penilaian di <a href="http://evortal.pom.go.id">evortal.pom.go.id</a> dan mengunggah data dukung penyelenggaraan pelayanan publik		selesai

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	Selesai	tindak lanjut Rencana Aksi	Timeline
14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	Implementasi pengisian Nomor Izin Edar produk belum sepenuhnya dilakukan oleh seller marketplace		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di marketplace kepada Idea dan marketplace</li> <li>2. Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan awareness seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA dan SK di platform penjualan marketplace</li> </ol>		

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	Tidak ada kendala sd Bulan Februari		Akan dilaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta telah direncanakan kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam		
16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap			Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM OT		
17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB			Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM Kos		
18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Pelaksanaan penilaian telah selesai dilaksanakan		1. selesai pengisian LKE ZI pada tanggal 2 April 2. telah dilaksanakan jadwal pra Desk WBBM/WBK		
19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos			1, benchmark ke P3OMN 2, Telah dibangun goolesite kedeputan 3, benchmark ke Surabaya , Patuh pada pedoman penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023		

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
20	Nilai Pengelolaan kearsipan			Tim pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan		
21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Penilaian akhir tahun				
22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos			dengan pelaksanaan rencana Aksi sehingga capaian indeks sd bulan Maret indeks sebesar 3		
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos			Telah dilaksanakan revisi dipa pemutakhiran data RPD pada tanggal 27 Maret		
24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa	Tidak ada kendala				
25	Nilai Pengelolaan barang milik negara					
26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tidak ada kendala				
27	TMK penandaan berulang		1.	2. Telah dilakukan analisa terhadap penyebab 3 TMK terbanyak yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim berlebihan sebagai trik dalam penjualan</li> <li>• Masih menggunakan kemasan</li> </ul>		

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi	tindak lanjut		
				Selesai	Rencana Aksi	Timeline
				lama tidak, penulisan komposisi yang berbeda atau perubahan formula diindikasi APJ tidak melakukan pengecekan 1. Terhadap penyebab tersebut telah dilakukan sebagai bahan bimtek 2. Bimtek dilakukan di Solo bulan Juni dan Desk di bodektabek bulan agustus		
28	Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan protokol kepada peneliti	Terdapat penelitian yang baru dimulai		Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan protokol kepada peneliti		

Demikian berita acara dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ketua Tim Evaluasi Internal Kedeputian  
 Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
 Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Jakarta, 6 Januari 2024  
 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
 Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm





Sasaran	Indikator		Target Tahunan	Target Bulan			Realisasi Bulan 10			Realisasi Bulan 11			Realisasi Bulan 12		
				B10	B11	B12	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	80												83.18
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	90,45												91.03
<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos</b>	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	85,37												85.38
<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos</b>	IKSP 9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	92,5	92,5	9158	10072	90,93	10180	11199	90,90	11267	12425	90,68
		Dit, Was OTSK					3700	4058	91,18	4117	4525	90,98	4573	5042	90,70
		Dit, Was Kos					5458	6014	90,75	6063	6674	90,85	6694	7383	90,67
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,5	83	82,5	82,5	933	1123	83,08	1123	1333	84,25	1312	1563	83,94

Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target Bulan			Realisasi Bulan 10			Realisasi Bulan 11			Realisasi Bulan 12			
			B10	B11	B12	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	
		Dit, Was OTSK					522	643	81,18	613	749	81,84	669	815	82,09
		Dit, Was Kos					411	480	85,63	510	584	87,33	643	748	87,33
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92	65	72	92	7	10	70,00%	7	10	70,00	16	17	94,12
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	99,2	98,7	98,7	98,7			99,22			99,21			99,27
		Dit,PMPU							99,22			99,21			99,27
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4,71						4.89			4.89			4.89
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	93,5	94	93,5	93,5	143066	148552	96,31	158409	164285	96,42	169736	178061	95,32
		Dit, Was OTSK					8143	8847	92,04	8143	8847	92,04	8890	9655	92,08
		Dit, Was Kos					21358	22712	94,04	23882	25301	81,84	23984	27894	94,39
		Dit, Registrasi					113565	116993	97,07	126384	130137	87,33	136862	140512	97,40
<b>Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90	90	4638,33	52	89,20	4503,33	50	90,07	4053,33	45,00	90,07
		Dit, Registrasi					4638,33	52,00	89,20	4503,33	50,00	90,07	4053,33	45,00	90,07

Sasaran	Indikator		Target Tahunan	Target Bulan			Realisasi Bulan 10			Realisasi Bulan 11			Realisasi Bulan 12		
				B10	B11	B12	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap Dit, PMPU	100	70	80	100	87	124	70,16%	100	124	80,65	125	125	100,00
										100	124	80,65	125	125	100,00
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB Dit, PMPU	100	70	80	100	94	133	70,68	108	133	81,20	134	134	100,00
							107	133		108	133	81,20	134	134	100,00
<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal</b>	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	92,04												89.54
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	80,05												80.66
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan kearsipan	96,02												98.19
<b>Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal</b>	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	91,04												87.82
<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	3	3	3	3			3			3			3.6



## LAMPIRAN II – NOTULEN RAPAT

## NOTULA

Nama Kegiatan : Rapat Monev Kedeputusan 2  
Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025  
Jam : 09.00 - 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Deputi 2  
Pimpinan Rapat: : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Agenda : 1. SPIP (PIC: WasKos)  
2. Monev Kinerja dan Anggaran (PIC: WasOTSK)  
3. Sistem Mutu (PIC: Standard)  
4. SAKIP (PIC: WasKos)  
5. Penyusunan Laporan Kinerja (PIC: Standard)  
6. PIPK (PIC: PMPU)  
7. RB (PIC: Reg)  
Hasil Pembahasan :

No.	Topik Pembahasan	Uraian
1	Arahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan & Kosmetik.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penilaian AKIP berda 80,66 yg meningkat dari tahun 2023, namun ada 2 komponen yang harus dilakukan improvement yaitu minimnya nilai pelaporan dan evaluasi kinerja internal</li><li>2. indikator kinerja penggunaan anggaran (ikpa), dahulu ada perubahan kriteria penilaian, penarikan dana yang tidak sesuai, penilaian KPPN dalam revisi anggaran masih offside. sekarang ada perubahan penilaian yaitu yang dinilai rasio realisasi volume. dengan perubahan ini harapannya kita bisa menyesuaikan dan meningkatkan peringkat</li><li>3. Monev bukan sekedar seremonial.</li></ol>
2	SPIP (PIC: Dit. Pengawasan Kosmetik)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil manajemen risiko indeks naik 0,125</li><li>1. telah disusun rencana tindak lanjut untuk mengurangi risiko sesuai paparan Hasil Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kedeputusan 2 Tahun 2024 = 2,844 (+0,125 dibanding tahun 2023)</li><li>2. Rencana Tindak Lanjut: a) menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Utama, b) penetapan kriteria dan dampak untuk masing-masing risiko, c) training kepada seluruh pegawai melibatkan narasumber luar dan inspektorat utama (Transit 2), d) Benchmark ke Dit PMPU PO, Dit Standar obat, dan Balai Besar POM di Semarang</li></ol>
	Diskusi	<p>Pak Deputi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. MRI merupakan kontribusi semua unit</li><li>2. nilai yang rendah bisa di dongkrak asal ada komitmen dari kita semua</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. manajemen risiko ini penting untuk mengukur IKU kita</li> <li>4. terdapat masukan pelaku usaha, anggota dewan, pejabat terkait percepatan perizinan, ini merupakan risiko juga agar respon kita tidak dianggap hal yang negatif.</li> <li>5. MRI perlu dikaji benefitnya hasil koordinasi dengan Pak Sestama. QMS ini tidak ada acuan hukumnya, sedangkan SPIP mandatory dari Perpres.</li> </ol> <p>Bu Reri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlu penyamaan persepsi tentang indeks risiko dengan inspektorat. Pak Deputi: Untuk capaian yg belum menggembarakan menjadi PR kita bersama, seluruh rekomendasi yg sudah disampaikan oleh irtama dilakukan bridging masing<sup>2</sup> komponen yang nilainya masih kecil, disertai dengan timeline kapan bisa tercapai. Perlu dilakukan bridging masing-masing komponen yang membuat nilai masih kecil.</li> <li>2. Bu Reri: Perlu adanya persamaan persepsi antara inspektorat dengan tim teknis pengawasan</li> <li>3. Pak Deputi: Perlu dikaji kembali isu-isu yang sudah ada dalam risk register dan dapat mengangkat isu-isu sensitif dalam risk register. Selain itu, perlu mengangkat isu terkait implementasi sistem manajemen mutu</li> </ol>
3	Monev Kinerja dan Anggaran (PIC: Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase OT SK yang MS belum mencapai target dengan kategori cukup. ini merupakan sampling acak. dalam hal ini kedepan akan menjadi target UPT. yang perlu diperhatikan kedepan akan diubah menjadi targeted</li> <li>2. SS2, ikepu masih belum mencapai target dengan kategori cukup</li> <li>1. indek RB masih kategori cukupCapaian Kinerja tahun 2024, yg belum tercapai SS1 poin 1.2 dan SS2 poin 2.1. Peran Pusat mengawal karena ada IKU baru di 2025 untuk UPT yang melaksanakan. Tahun 2025 samplingnya targeted, potensi <i>uncontrollable</i> lebih besar. Target 2025 akan diusulkan turun ke 60-an%.</li> <li>2. Indeks RB capaiannya hanya 97,29, sementara hanya Dit Standard yang mencapai WBK.</li> <li>3. Upaya-upaya intervensi telah disusun oleh Deputi II untuk 3 indikator yang tidak tercapai.</li> </ol>
	Diskusi	<p>Bu Aan</p> <p>Pak Irwan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk 2025 indeks yang terkait persentase produk MS ditingkatkan ke Kedeputian bukan di UPT. walaupun targetnya diturunkan ke 60-70. perlu ada strategi</li> </ol>

2. ikepu bukan hanya OT tapi juga di kosmetik
- 3.

#### Deputi

1. susun terlebih dahulu apa yang harus dilakukan untuk mencapai indikator tsb dengan membuat guidance
2. kita lakukan intrvensi tp tidak ada monev pelaku usaha. sanksi tidak diikuti monev, misal sanksi harus dimonev sampai closed. TL monev bs dilakukan dengan sampling
3. capaian indikator yang tidak tercapai:
  - penyesuaian target dilakukan untuk mendekati realita
4. bisa dibuatkan pilot project dengan pemda misal semarang atau pemda yang mempunyai komitmen
5. SAKIP tertinggi UPT : surabaya, Pusat :P3OMN
6. migrasi target ke pusat bukan menjadi momok ada hal positif yaitu: produk yang diawasi UPT belum tentu ada di UPT tersebut, hasil pemeriksaan lintas daerah dapat di TL pusat melalui direktorat, dan monev dapat dilakukan dengan komprehensif oleh pusat.

#### Bu Rust

1. Katim kemandirian UPT sudah dibentuk yang berperan memetakan masalah

#### Bu Maya

1. perlu dicarikan peluang di Pemda tentang laporan perkembangan pelaku usaha di daerahnya, semisal raport merah

#### Bu Reri

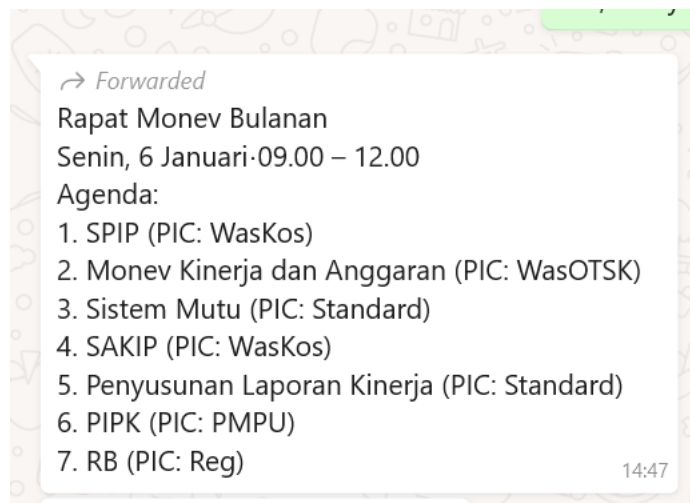
1. adanya perencanaan kinerja yang perlu disesuaikan pada tahun 2023
2. persoalan sifting dari offline ke online
3. migrasi target dr UPT ke Pusat, nilai TMS memang besar sekitar 50%
4. dengan nilai yang besar tersebut bisa menjadi rekomendasi penambahan SDM, peningkatan infrastruktur dan metode yang presisi
1. Dir Was Kos : untuk tahun 2025 indikator yang berkaitan %tase OTSKKos yang aman dan bermutu, perlu disusun guidance untuk UPT.  
Pak Deputi : silakan disusun, usulan yang konkrit, tidak normatif.  
Dir Was OTSK : di Wasot ada tim kemandirian UPT utk lebih digerakkan dalam pencapaian IKU tsb.

		<p>Pak Deputi : masih normatif, endapkan dulu, diskusikan lebih lanjut nanti.</p> <p>2. Pak Dep : narasinya diubah, bukan menurunkan target tapi menyesuaikan target. Penurunan anggaran tidak boleh menurunkan output. Kenyataannya masih bisa melakukan kegiatan yang tidak ada outputnya. Antar Eselon I sudah dibahas, tidak ada lagi alasan menghambat. Rapat di hotel yang tidak berdampak langsung, hold dulu.</p> <p>3. PFU Bu Maya : cari celah utk sosialisasi atau pendampingan pelaku usaha (Pemda). Pak Dep : jika belum bisa semua, nanti bisa dibuat pilot project misal Semarang atau Mataram.</p> <p>4. PFU Bu Reri : tahun 2022 ada perencanaan kinerja yang tidak sesuai.</p> <p>5. Pak Deputi : jangan jadi ketakutan bahwa IKU pengawasan ditarik ke Kedeputian, belum jadi awareness. Kenapa kalo di level UPT? jika tidak tercapai akan berdampak ke kinerja. Produk yang diawasi UPT, belum tentu root cause-nya di wilayah UPT tsb, oleh karena itu harus level Deputi yang turun tangan.. Harus dikawal lebih dalam, lebih konkret. Pak Dep : bulan depan monev berikutnya utk dibahas sanksi bagi UPT atau unit kerja.</p>
4	Sistem Mutu (PIC: Dit. Standardisasi OT, SK dan Kosmetik)	1.
	Diskusi	<p>Pak Deputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomenklatur perlu ada penyesuaian agar sesuai Perpres</li> <li>2. perlu ada regulasi yang mengakomodir permasalahan di lapangan</li> <li>3. memperbanyak iso akan menjadi beban, tapi yang penting itu muatan kinerjanya, jadi sebenarnya SPI saja</li> </ol>
5	SAKIP (PIC: Dit. Pengawasan Kosmetik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alhamdulillah bisa mendapatkan kenaikan SAKIP 2024 menjadi 80,66 atau kategori A</li> <li>1. agenda SAKIP: Penyampaian draft Renstra 2025-2029 dan penyusunan PK dan RAPK tahun 2025 melalui aplikasi simetris (26 januari 2025). Hasil Evaluasi sakip tahun 2024 adalah sebesar 80,66 mengalami kenaikan dari tahun 2023.</li> <li>2. Penyampaian Draft renstra kedeputian periode 2025-2029 (6 Januari 2025)</li> <li>2. Penyusunan PK dan RAPK tahun 2025 (26 Januari 2025)</li> </ol>
	Diskusi	<p>Pak Deputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perhatikan nilai evaluasi internal dan pelaporan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. penyusunan PK dan RAPK harus dikawal agar sesuai waktu</li> <li>3. perlu dibuat matriks, seperti anggaran, manrisk: aspek: PIC siapa dan monevnya bagaimana</li> <li>4. menyandingkan dengan unit kerja yang mirip (benchmark), kemudian dibahas</li> <li>5. lakukan identifikasi melalui banchmark untuk menaikkan nilai</li> </ol> <p>Bu Rust</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam REN akan dimasukkan monev <ul style="list-style-type: none"> <li>• monev dapat dimasukkan dalam apliaksi SATELITMasih terdapat komponen yang mengalami penurunan yaitu pada komponen capaian kinerja.</li> <li>• agar dilakukan identifikasi untuk masing-masing aspek penilaian per komponen</li> <li>• teliti kembali terkait pelaporan kinerja serta evaluasi internal.</li> <li>• sandingkan apa-apa saja yang telah dilakukan untuk perbaikan sikip dengan hasil banchmark ke unit lain serta apa yang dapat dilakukan perbaikan.</li> </ul> </li> <li>2. identifikasi laporan evaluasi internal kita dan bandingkan dengan BBPOM surabaya / P3OMN</li> </ol>
6	Penyusunan Laporan Kinerja (PIC: Dit. Standardisasi OT, SK dan Kosmetik)	
	Diskusi	
7	PIPK (PIC: Dit. PMPU OT, SK dan Kosmetik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. telah dilakukan rapat dengan inspektorat, biro Umum</li> <li>2. jika pencatatan tahun 2025 harus ada surat pernyataan dari pengguna anggaran/ KPB c.q. Pak Irwan.</li> <li>3. permohonan inaktivasi/hapus akun</li> </ol>
	Diskusi	<p>Pak Deputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SAP menjadi pedoman tentang penetapan barang, di biro perencanaan</li> <li>2.</li> </ol> <p>Bu Rust</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. status penetapan</li> </ol>
8	RB (PIC: Dit. Registrasi OT, SK dan Kosmetik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. potret capaian masih dibawah target</li> <li>2. matriks rekomendasi dan RTL sudah disusun untuk melihat progress</li> <li>3. Ditreg mendapat nilai terbaik pada kelompok rentan</li> <li>4. Ditwaskos paling tinggi dari semua unit</li> </ol>

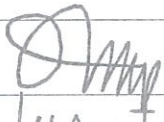
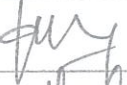
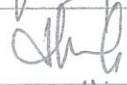






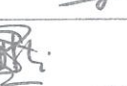
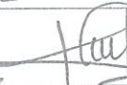
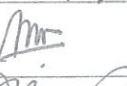
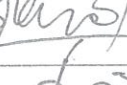
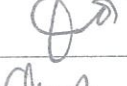
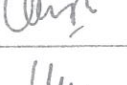
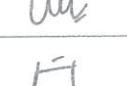
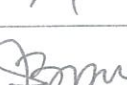
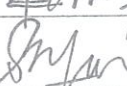

		5. kelemahan utama seputar pelaksanaan monev dan pengukuran dampak
	Diskusi	<p>Pak Deputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TL masih bersifat normatif, belum terlihat secara dalam.</li> <li>2. evaluasi manajemen perubahan sesuai dengan LKE</li> <li>3. lakukan monev secara berkala terhadap GAP hasil RB</li> <li>4. lakukan breakdown terhadap yang belum tercapai pada LKE</li> <li>5. perlu ada pengawalan dan mantaince RB agar bisa tercapai dengan baik</li> <li>6. pelanggaran bisa terjadi karena belum tersosialisasi atau bisa juga karena standar yang terlalu tinggi</li> </ol> <p>Bu Maya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang diperlukan oleh stakeholder adalah kepastian, time line, kejelasan, rule of the game jelas</li> <li>2. jepang time line sll konsisten 40 hari, tidak masalah karena rule of the game jelas</li> </ol> <p>bu reri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pra kondisi itu masih perlu dalam tata kelola capaian indeks RB</li> </ol>
9	Lain-lain	

## DOKUMENTASI



## DAFTAR HADIR

Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedepuitan 2  
di Ruang Rapat Deputy 2, Jakarta

No.	Nama	L/P	Unit Kerja	Tanda tangan
1.	Mohamad Kashuri	L	Deputi 2	
2.	Dian putri	P	Dit standar OTSK	
3.	Anisyah	P	Dit Reg OTSK	
4.	Mesla NURWITASARI	P	Ditwas OTSK	
5.	Mellia Rahmi	P	"	
6.	Maesya Bachmanah	P	Ditreg OTSK	
7.	Rachmi Setyorini	P	Ditreg OT, SF-KOS	
8.	Rusbyawati	P	Ditwas OTSK	
9.	ERWINT YAHYA	L	Ditreg OTSK KOS	
10.	Andhika Prayoga	L	Ditwas kos	
11.	SRI PUJATI	P	Dit Reg OT, SIK & KOS	
12.	Aphzal	L	Dit. Standardisasi OTSK	
13.	Joelianingsih	P	Ditwas kos	
14.	Luthfiana	P	Ditwas kos	
15.	Nurvika W	P	Dit. PMPU OTSK	
16.	Mia P	P	Dit. Standardisasi OTSK	
17.	Widha Dianasari	P	Dit. PMPU OTSK	
18.	API Moxi	P	Dit PMPU OTSK	
19.	Yurita	P	Dit Standardisasi OTSK	
20.	Anto Sugono	L	Dit was kos	